

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN JUDUL TESIS	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
INTISARI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
1. Mas Achmad Santosa, 2014, dengan judul Disertasi “Efektifitas Penegakan Hukum Administrasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah	8
2. Miftahudin, 2019, dengan judul Tesis “Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Terhadap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melakukan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup”.	10
3. Lidia Hayaty, 2019, dengan judul Tesis: “Kajian Hukum Perlawanan PT Kaswari Unggul Terhadap Sanksi Administratif Atas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan”.	11
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Tujuan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.....	18
B. Penegakan Hukum Administrasi	25
C. Asas-Asas Hukum Dalam Penegakan Hukum Administrasi.....	32
D. Pelanggaran Serius	38

E. Sanksi Administrasi	43
F. Kewenangan Kementerian LHK dalam Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan izin	53
G. Penerapan Sanksi Administrasi oleh Kementerian LHK	62
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Bahan atau Materi Penelitian	67
C. Ruang Lingkup Penelitian	68
1. Fokus Penelitian	68
2. Subyek Penelitian	69
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	70
E. Tahapan Penelitian	70
1. Tahap Persiapan	70
2. Tahap Pelaksanaan	71
3. Tahap Penyelesaian	71
F. Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Kewenangan Penegakan Hukum oleh Menteri terhadap PT. Expravet. Nasuba yang Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan	73
1. Kronologi Penerapan Sanksi Administratif terhadap PT Expravet Nasuba	73
2. Kewenangan Penegakan Hukum oleh Menteri terhadap PT. Expravet Nasuba yang Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Medan	80
B. Pelanggaran Serius PT Expravet Nasuba Sebagai Alasan Penerapan Sanksi Administratif oleh Menteri	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127